

LAPORAN HASIL PENELITIAN

**POLA PEMBINAAN YANG TERATUR
FAKTOR PERTUMBUHAN KOPERASI DI KABUPATEN BREBES**



Oleh

**MEDI TRI PURWANTO, SE, MM.
NIDN. 06.2605.7702
medip24@gmail.com**

**ULUL ABSOR, SE., MM
NIDN. 0615108004
ulul.absor.niha@gmail.com**

**PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI
WIDYA MANGGALIA
BREBES
2021**



SEKOLAH TINGGI ILMU EKONOMI WIDYA MANGGALIA

Kampus : Jl. Taman Siswa KM. 1 Padasugih - Brebes Telp. (0283) 6176255

website : <http://www.stiewidyamanggalia.ac.id>

TERAKREDITASI B BAN PT SK. No. 3521/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2019

SURAT TUGAS

Nomor : 002/PPPM/STIE/III/A-2021

Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Widya Manggalia Brebes menugaskan kepada :

1. Nama : Medi Tri Purwanto, SE, MM.
NIDN : 06.2605.7702
Jabatan : Dosen Tetap
2. Nama : Ulul Absor, SE, MM.
NIDN : 06.1510.8004
Jabatan : Dosen Tetap

Untuk melaksanakan kegiatan penelitian sebagai berikut :

- Waktu : 3 Maret s.d 2 Juni 2021
Tempat : Dinas Koperasi, Usaha Mikro Dan Perdagangan Kabupaten Brebes
Judul Penelitian : Pola Pembinaan Yang Teratur Sebagai Faktor Pertumbuhan Koperasi Di Kabupaten Brebes

Demikian surat tugas ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Brebes, 2 Maret 2021

Kepala



Medi Tri Purwanto, SE, MM.
NIDN. 06.2605.7702

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Penelitian : Pola Pembinaan Yang Teratur Sebagai Faktor Pertumbuhan Koperasi Di Kabupaten Brebes

Tim Peneliti

Ketua Peneliti

Nama : Medi Tri Purwanto, SE., MM.
NIDN : 0626057702
Unit Kerja : STIE Widya Manggalia

Anggota Peneliti

Nama : Ulul Absor, SE., MM,
NIDN : 0615108004
Unit Kerja : STIE Widya Manggalia

Waktu : 3 (Tiga) bulan dari tanggal 3 Maret s/d 2 Juni 2021

Tempat : Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Sumber Dana

1. PPPM STIE Widya Manggalia	: Rp. 1.500.000,00
2. Mandiri	: Rp. 1.500.000,00
Jumlah Dana	: Rp. 3.000.000,00

Disahkan dan disetujui

Mengesahkan
Ketua STIE Widya Manggalia

Magdalena Puari Senduk, SH., MM
NIPY. 160900031

Ketua PPPM STIE Widya Manggalia

Medi Tri Purwanto, SE., MM
0626057702

POLA PEMBINAAN YANG TERATUR SEBAGAI FAKTOR PERTUMBUHAN KOPERASI DI KABUPATEN BREBES

Oleh :

Medi Tri Purwanto, SE., MM.

Medip2477@gmail.com

Ulul Absor, SE., MM

ulul.absor.niha@gmail.com

Abstract

Cooperative development as one of the regional policies plays an important role in encouraging overall regional growth. The main weakness of cooperatives lies in human problems (human resources) with all their shortcomings and weaknesses. Therefore, the cooperative development program is structured with the support of the need for strengthening human capabilities in various aspects such as mastery of technology, entrepreneurship and management. For this reason, it is necessary that the availability and guarantee of capital and facilities are not yet a benchmark for the realization of the development of advanced and independent cooperatives. The development of cooperatives is very likely to be developed into an advanced and independent business. The cause of low productivity results, because the productivity of administrators and managers is also still low, the way to solve this problem is to realize technology to increase productivity through technological skills apprenticeship activities in more advanced cooperatives.

Keywords: Cooperatives, Patterns of Development and Growth

A. Latar Belakang Masalah

Pembangunan koperasi sebagai salah satu kebijakan daerah memegang peranan penting dalam mendorong pertumbuhan daerah secara keseluruhan. Koperasi telah mampu memainkan peran strategis dalam perekonomian daerah. Kontribusi di berbagai sektor pembangunan nasional sangat besar, seperti menyerap banyak tenaga kerja, memperluas lapangan usaha dan menyumbang pendapatan asli daerah.

Implementasi kebijakan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah terhadap penyelenggaraan kesejahteraan sosial telah membawa paradigma baru dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah serta dalam hubungan antara Pusat dengan Daerah. Kebijakan Otonomi Daerah memberikan kewenangan yang luas kepada Daerah untuk mengurus dan mengatur kepentingan masyarakatnya atas prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undang yang berlaku.

Jadi UU Nomor 23 Tahun 2014 memberikan hak kepada daerah berupa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Pengaturan dan pengurusan kepentingan masyarakat tersebut merupakan prakarsa daerah sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dan bukan lagi merupakan instruksi dari pusat. Sehingga daerah dituntut untuk responsif dan akomodatif terhadap tuntutan dan aspirasi masyarakatnya.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 ditetapkan kewenangan Pemerintah (Pusat) di bidang perkoperasian yang meliputi :

1. Penetapan pedoman akuntansi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
2. Penetapan pedoman tata cara penyertaan modal pada koperasi.
3. Fasilitasi pengembangan sistem distribusi bagi koperasi dan pengusaha kecil dan menengah.
4. Fasilitasi kerjasama antar koperasi dan pengusaha kecil dan menengah serta kerjasama dengan badan usaha lain.

Perkembangan koperasi di kabupaten Brebes ini cukup baik dengan jumlah koperasi setiap tahunnya. Namun demikian dari jumlah koperasi yang ada setiap kecamatan hanya memiliki satu unit Koperasi Unit Desa, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Kecamatan	Jenis Koperasi					Jumlah Total
	KUD	KPRI	KOPKAR	KOPRAS	Lainnya Other	
Salem	1	1	-	-	11	13
Bantarkawung	1	1	-	-	11	13
Bumiayu	1	2	5	3	24	35
Paguyangan	1	1	2	1	21	26
Sirampog	1	1	2	-	10	14
Tonjong	1	1	2	-	13	17
Larangan	1	1	-	1	14	17
Ketanggungan	3	2	-	-	5	10

Banjarharjo	3	3	-	1	9	16
Losari	3	1	-	2	10	16
Tanjung	2	2	-	-	9	13
Kersana	1	2	2	-	4	9
Bulakamba	3	2	4	-	22	31
Wanasari	2	3	1	1	20	27
Songgom	1	-	-	1	7	9
Jatibarang	1	2	1	1	8	13
Brebes	1	22	7	3	63	96
Kabupaten Brebes	27	47	26	14	261	375

Sumber: Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes

Jumlah koperasi yang ada di Kabupaten Brebes perlu dibina guna menunjang pendapatan asli daerah, untuk itu pemerintah perlu membina dengan baik koperasi yang ada dengan baik, agar tidak mengalami pasang surut dalam menjalankan usahanya. Namun dalam perjalanan banyak koperasi yang mengalami kendala dan permasalahan.

Kelemahan utama koperasi terletak pada persoalan manusia (sumber daya manusia) dengan segala kekurangan dan kelemahannya. Oleh karena itu, program pengembangan koperasi disusun dengan didukung kebutuhan penguatan kapabilitas manusia dalam berbagai aspek seperti penguasaan teknologi, kewirausahaan dan manajemen.

Salah satu pengembangan koperasi adalah pengembangan sumber daya manusia melalui akumulasi kewirausahaan. Wawasan bisnis dan penguasaan teknologi dan kemampuan pengendalian sosial dengan misi pengembangan antara lain pemanfaatan terbaik hasil pertanian dan biologi dengan memberikan nilai tambah yang tinggi, meningkatkan keuntungan finansial masyarakat dan meningkatkan peluang usaha atau kesempatan kerja.

Selaras antara satu dalam semua prioritas pengembangan koperasi, khususnya pasokan bahan baku yang aman dan teknologi dasar untuk memasok barang dagangan yang dikendalikan oleh otoritas kebijakan dalam pembangunan lima tahun daerah yang ditetapkan dalam sektor koperasi dan pengembangan agroindustri sedangkan pada konstanta Semakin meningkatnya keterkaitan yang saling ketergantungan antara petani produsen dan pelaku usaha, adanya agroindustri yang menjamin kenyamanan bahan baku, dapat diterima untuk upaya pengembangan ke arah yang lebih baik dan mandiri.

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berjalan beriringan dengan meningkatnya kegiatan ekonomi telah mempengaruhi peningkatan perkembangan koperasi, hal ini dapat berakibat beban tugas pembinaan dan pengembangan koperasi semakin meningkat. Lengkaplah bahwa kinerja koperasi selama ini terlihat dalam ketidakseimbangan antara berbagai tugas dan kemampuan yang mereka butuhkan, terutama yang berkaitan dengan tenaga kerja penyuluh koperasi dan oleh karena itu para penasihat struktural yang tidak memadai, masing-masing dalam jumlah dan kualitas. .

Dengan kekuatan personel dan sarana terbatas yang berkualitas, sulit untuk memenuhi tugas pembinaan dan pengembangan koperasi secara optimal. Untuk itu perlu diselenggarakan SDM pengawas yang memadai, agar tugas pembinaan dan pengembangan koperasi sering terlaksana secara efektif dan efisien, khususnya dengan memahami dan berupaya menyelesaikan persoalan-persoalan yang ada di dalam koperasi itu sendiri.

Melalui pemahaman dan upaya menyelesaikan persoalan koperasi, diharapkan siap menghasilkan kondisi bagi penyelenggaraan koperasi lepas di masa mendatang.

Dengan mengetahui sebagian besar permasalahan koperasi, khususnya rendahnya produktivitas dan penyebabnya, maka untuk mewujudkan tujuan yang diinginkan sering tercapai, diperlukan banyak upaya pembinaan kerja unit bidang tertentu. Melalui kegiatan pembinaan kerja untuk meningkatkan keterampilan teknologi, diharapkan ada wawasan tentang pengembangan bisnis, masing-masing mengenai teknologi metode, teknologi penggunaan alat dan manajemen kewirausahaan. Untuk produktivitas koperasi tambahan, diikuti dengan motivasi tinggi dan pemenuhan modal yang terbaik, bukan tidak mungkin koperasi akan siap untuk berkembang ke depan dan terutama dari minimal satu unit koperasi sehingga mereka menjadi pembina dari unit koperasi yang berbeda.

Untuk mencapai keadaan yang diinginkan, perlu dipahami peningkatan pendidikan koperasi, kepercayaan keterampilan teknologi dan oleh karena itu terwujudnya koordinasi tugas pembinaan antar instansi.

B. Tinjauan Pustaka

1. Koperasi

Dalam Undang-undang Nomor 25 tahun 1992 dimaksud dengan Koperasi adalah

Badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.

Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM RI Nomor 04 Tahun 2012 bahwa :

Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi, sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan

Menurut Rudianto (2015:3), “Koperasi adalah perkumpulan orang yang secara sukarela mempersatukan diri untuk berjuang meningkatkan kesejahteraan ekonomi mereka melalui pembentukan sebuah badan usaha yang dikelola secara demokratis.”

Berdasarkan pengertian tersebut di atas, sering kali dikatakan bahwa koperasi adalah suatu usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum Koperasi yang menjalankan kegiatannya semata-mata dengan prinsip

kekeluargaan dan bertujuan memajukan kesejahteraan anggota serta masyarakat belum sebagai membangun tatanan ekonomi nasional.

2. Pola Pembinaan

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, pola berarti gambar, contoh dan model. Adapun pembinaan adalah usaha tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk memperoleh hasil yang baik.

Menurut Mitha Thoha (2003:182) “Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu”. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu :

- a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan.
- b. Pembinaan bisa menunjukan kepada perbaikan atas sesuatu.

Dari definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pembinaan adalah suatu cobaan atau kegiatan membagikan untuk mendongkrak apa yang sudah ada menjadi lebih tinggi (sempurna) masing-masing melalui pemeliharaan dan pengarahan terhadap apa yang sudah ada (yang sudah dimiliki). Ditambah lagi dengan memperoleh hal-hal yang tidak mereka miliki, khususnya informasi dan keterampilan baru.

C. Masalah dan Pemecahan

1. Identifikasi dan Analisis Masalah

Apabila dibandingkan antara keadaan sekarang dengan keadaan yang diinginkan dimasa yang akan datang, maka terdapat kesenjangan yang memberikan indikasi adanya masalah yang harus diidentifikasi dan dianalisis untuk dicari jalan pemecahannya.

Masalah yang ada pada koperasi berkaitan dengan upaya mewujudkan koperasi yang berkembang maju dan mandiri, masalah utama, masalah pokok dan masalah spesifik koperasi yang sangat berpengaruh adalah sebagai berikut :

- a. Masalah utama

Rendahnya produksi koperasi, masalah tersebut digambarkan pada koperasi induk kapasitas produksi yang ada tersebut dalam Tanda Daftar Koperasi tidak tercapai dan kecenderungan koperasi dalam usahanya menjual jasa. Di samping itu pada setiap kesempatan koperasi tidak dapat memenuhi permintaan para anggotanya.

- b. Masalah pokok

Rendahnya produksi koperasi, apabila dikaji disebabkan oleh masalah pokok sebagai berikut :

- 1) Kurangnya motivasi pengurus dan pengelola koperasi
- 2) Kurangnya produktivitas pengurus dan pengelola koperasi
- 3) Kurangnya modal dan fasilitas modal dari berbagai pihak belum dimanfaatkan optimal oleh koperasi.

Dari penyebab – penyebab di atas dapat dijelaskan sebagai berikut :

Kurangnya motivasi pengurus koperasi dalam kegiatan usahanya, hal ini merupakan suatu yang cukup gawat dikarenakan pada umumnya pengurus merasa cukup puas dengan usahanya, tidak mau berhubungan lagi dengan kesulitan – kesulitan yang akan timbul, sehingga menyita waktu untuk meningkatkan produksi. Kurangnya produktivitas koperasi, merupakan suatu hal yang sangat gawat dikarenakan peluang pasar atau permintaan anggota tidak dapat terpenuhi.

Kurangnya modal dan fasilitas modal dari berbagai pihak belum dimanfaatkan merupakan suatu hal yang rugi dikarenakan kesempatan yang diberikan dari berbagai pihak berupa pinjaman lunak untuk memacu pengembangan usaha belum ditanggapi positif untuk penambahan modal kerja.

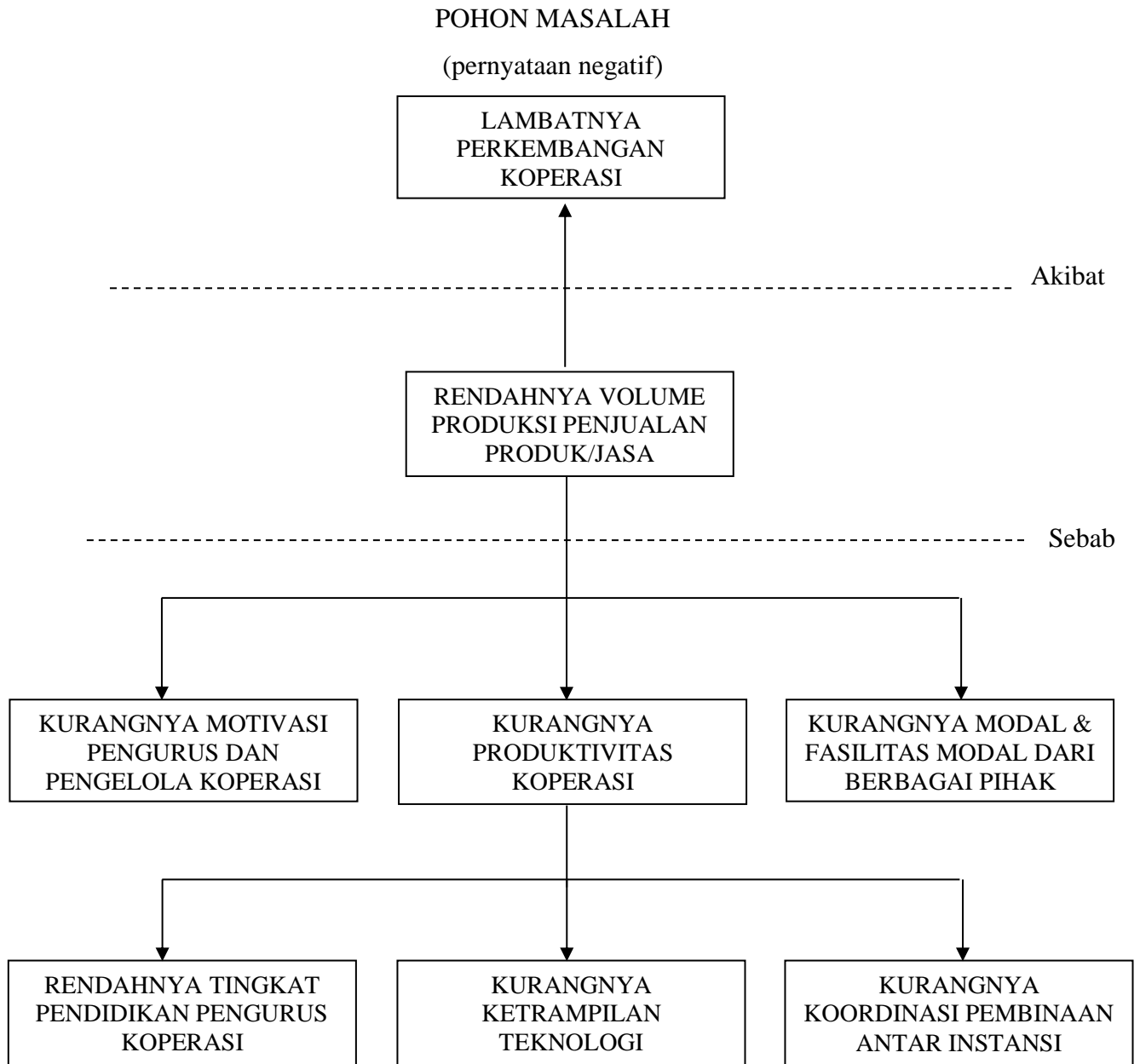
Setelah melihat penilaian tingkat pengamatan dari faktor – faktor penyebab di atas, maka penyebab yang paling menonjol adalah kurangnya produktivitas pengurus dan pengelola koperasi.

c. Masalah spesifik

Kurangnya produktivitas koperasi, apabila dikaji lebih lanjut disebabkan oleh :

- 1) Rendahnya tingkat pendidikan pengurus dan pengelola koperasi
- 2) Kurangnya ketrampilan teknologi yang dimiliki
- 3) Kurangnya koordinasi pembinaan antar instansi terkait

Dari masalah spesifik tersebut, melalui penilaian, pengamatan, maka masalah spesifik prioritas yaitu penyebab yang paling menonjol terjadinya masalah pokok kurangnya produktivitas koperasi dan kurangnya ketrampilan teknologi yang dimiliki. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pohon masalah sebagai berikut ini



2. Sasaran

Untuk mewujudkan sasaran terwujudnya koperasi yang optimal diperlukan langkah – langkah dengan mengubah faktor penyebab utama produktivitas yang optimal.

Produktivitas yang optimal di atas perlu ditunjang oleh faktor – faktor penyebab yang mempunyai pengaruh kondisi yang diinginkan yaitu dengan jalan :

- a. Terwujudnya motivasi pengurus dan pengelola koperasi, dengan meningkatkan motivasi diharapkan pengembangan koperasi akan terpicirkan oleh pengurus dan pengelola koperasi melalui kegiatan

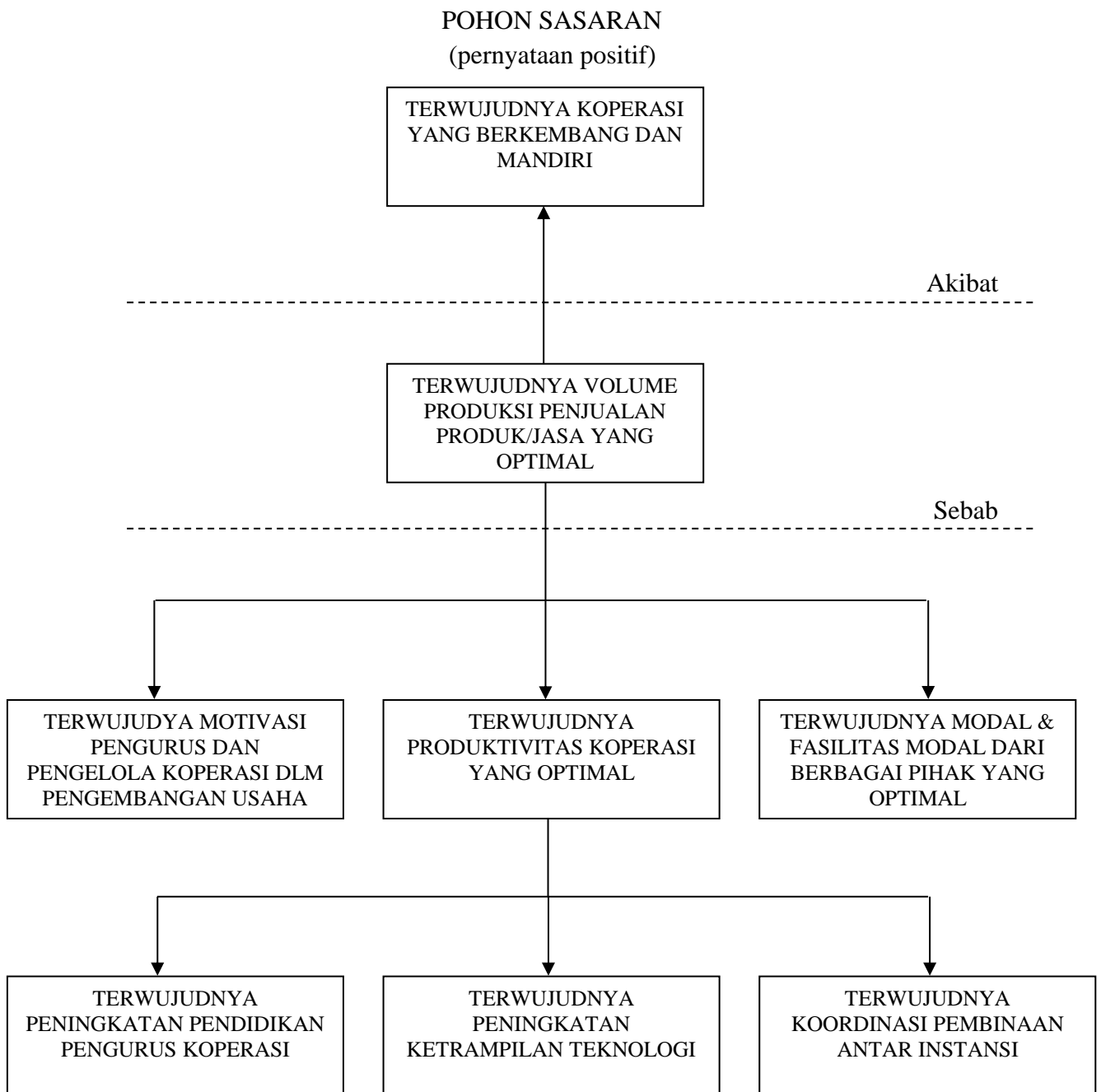
produksi yang memberikan nilai tambah dengan mengetahui dan memanfaatkan peluang/permintaan pasar.

- b. Terwujudnya produktivitas koperasi yang optimal, dengan terwujudnya produktivitas yang optimal maka diharapkan permintaan pasar/anggota dengan batasan waktu dapat terpenuhi.
- c. Terwujudnya modal dan fasilitas modal dari berbagai pihak dimanfaatkan optimal, dengan meningkatnya modal melalui bantuan modal BUMN, Lembaga Keuangan lainnya dengan kredit lunak untuk kegiatan yang produktif.

Dari faktor – faktor penyebab yang paling berpengaruh dalam mewujudkan sasaran adalah terwujudnya produktivitas pengurus dan pengelola koperasi yang optimal, dimana untuk mewujudkan hal ini peranan dari instansi Pembina sangat dibutuhkan yang tentunya ditunjang oleh :

- a. Terwujudnya peningkatan pendidikan pengurus dan pengelola koperasi yang akan mempengaruhi tingkat pemahaman untuk meningkatkan kemampuan dalam kegiatan produktivitas.
- b. Terwujudnya ketrampilan teknologi produksi. Ketrampilan teknologi produksi oleh para anggota koperasi sangat dibutuhkan karena kegiatan produksi dibatasi oleh waktu dengan demikian akan dapat direncanakan produksi dalam waktu yang ditentukan.
- c. Terwujudnya koordinasi pembinaan antar instansi. Koordinasi pembinaan antar instansi pembinaan yang dibutuhkan, hal ini untuk efektif dan efisiensi pembinaan dan saling menunjang/melengkapi.

Dari ketiga faktor tersebut setelah dipertimbangkan faktor penunjang yang paling mendesak adalah terwujudnya ketrampilan teknologi produksi bagi para anggota koperasi, karena berdasarkan skala prioritas sangat dibutuhkan dan mempengaruhi langsung dalam kegiatan proses produksi. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada pohon sasaran sebagai berikut :

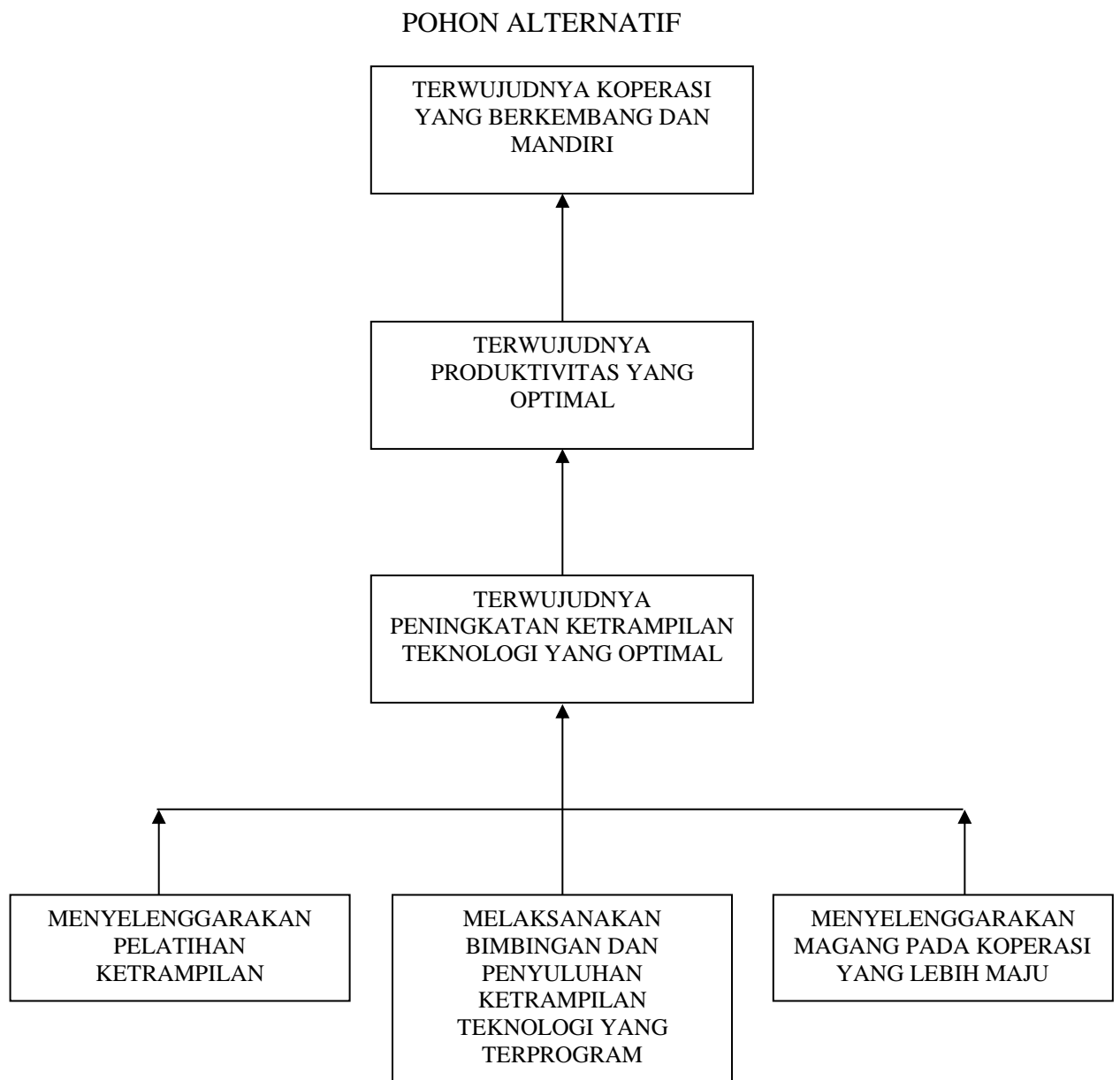


Untuk mewujudkan sasaran yang telah ditetapkan guna pemecahan masalah perlu ditentukan kegiatan yang dilakukan dengan analisis pohon alternatif. Terwujudnya ketrampilan teknologi pada koperasi dengan mengadakan beberapa kegiatan antara lain :

1. Mengadakan pelatihan ketrampilan teknologi pada pengurus dan pengelola koperasi.
2. Menyelenggarakan magang pelatihan ketrampilan teknologi pada koperasi yang lebih maju.

3. Melaksanakan bimbingan dan penyuluhan ketrampilan teknologi terprogram koperasi.

Dari ketiga gambaran kegiatan di atas, setelah melalui beberapa pertimbangan manfaat, efektivitas dan efisiensi, biaya, waktu, kemudahan administrasi dan pertimbangan lainnya kegiatan yang tepat dan cepat terwujud sasaran adalah menyelenggarakan magang ketrampilan teknologi pada koperasi yang lebih maju. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada analisis pohon alternatif berikut ini :



D. Penutup

1. Ketersediaan dan terjaminnya modal dan fasilitas belum merupakan tolok ukur akan terwujudnya perkembangan koperasi yang maju dan mandiri.
2. Perkembangan koperasi sangat mungkin dikembangkan menjadi usaha yang maju dan mandiri minimalnya dapat terwujud 1 unit koperasi yang ada berkembang maju dan mandiri sehingga menjadi Pembina dari koperasi yang lainnya.
3. penyebab hasil produktivitas rendah, karena produktivitas pengurus dan pengelola juga masih rendah, maka jalan pemecahan masalah tersebut dengan mewujudkan teknologi guna meningkatkan produktivitas melalui kegiatan magang ketrampilan teknologi pada koperasi yang lebih maju.

Daftar Pustaka

Rudianto. (2015). *Akuntansi Koperasi* Edisi ke Dua. Jakarta: Erlangga.

Thoha, Miftah. (2003). *Perilaku Organisasi Konsep Dasar Dan Aplikasi*. Rajawali : Jakarta.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom.

Departemen Pendidikan Nasional, (2008), *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Pusat Bahasa.

Dinas Koperasi, Usaha Mikro dan Perdagangan Kabupaten Brebes